



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN**

RENCANA KERJA TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh semangat untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ini disusun sebagai salah satu bagian dari substansi perencanaan di Kabupaten Nunukan. Dokumen Renja DLH Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari Renstra DLH Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029. Dalam penyusunannya dokumen Renja 2026 hanya berpedoman pada RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025, dan memuat isu-isu strategis, kebijakan, program dan kegiatan, serta sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan, namun telah menjadi komitmen DLH Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

Akhir kata, semoga Renja DLH Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan dapat mendorong kita untuk segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Nunukan,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU	10
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH	10
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH	16
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH	24
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD	24
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	25
 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	26
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	26
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLH	27
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	28
 BAB IV PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Renja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam penyusunan Renja - OPD merujuk Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Proses penyusunan RKPD DLH Kab. Nunukan adalah bersifat komprehensif melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2004 maka proses tersebut diawali dengan membuat dan menyusun rancangan awal RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD yang merupakan bahan penyusunan rancangan RKPD. Penyusunan rancangan awal RKPD adalah bersamaan dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tingkat kecamatan sampai dengan pelaksanaan forum SKPD di DLH Kab. Nunukan, atas beberapa pertimbangan tersebut maka disusunlah RKPD rancangan dan sekaligus di follow up sebagai rancangan akhir RKPD DLH Kab. Nunukan. Penyusunan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Nunukan Tahun 2026 ini mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah Terpilih (RPJMD Kota Nunukan 2025 - 2029).

Penyusunan Renja OPD ini sebagai bahan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) 2026. KUA - PPAS tahun 2025 ini akan dimintakan persetujuan dari Legislatif (DPRD) Kabupaten Nunukan dan dibuat MOU. Dengan telah ditandatanganinya MOU KUA - PPAS antara Eksekutif (Kepala Daerah) dengan Legislatif (DPRD) akan menjadi dasar bagi setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD) yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Dokumen Renja OPD disusun dalam basis tahunan. Renja OPD ini merupakan dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan partisipasi dari masyarakat.

Prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan Renja - OPD tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengacu pada Rancangan RKPD Tahun 2026, yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD tahun 2026, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2026.
2. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

3. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD serta dapat menjawab berbagai isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
4. Memasukkan usulan kegiatan hasil musrenbang kelurahan/kecamatan dan pokok-pokok pikiran dewan yang terkait dengan OPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
5. Mengakomodir hasil-hasil Focus Group Discussion (FGD) terkait prioritas yang akan dilaksanakan OPD tahun 2026.
6. Substansi rancangan Renja OPD Tahun 2026 memuat :
 - a. Program dan kegiatan
 - b. Lokasi kegiatan
 - c. Indikator kinerja
 - d. Kelompok sasaran
 - e. Pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2027
7. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
8. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan SPM (Standar Pelayanan Minimum) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan yang dimaksud tersedia).

Dalam penyusunan Renja OPD 2026 ini akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator kinerja dan target kinerja Renja tahun 2026 mengacu pada RPJMD 2025-2029 dan Renstra 2025-2029
2. Mengakomodir hasil-hasil Focus Group Discussion (FGD) terkait prioritas yang akan dilaksanakan OPD tahun 2026.
3. Untuk mendukung akuntabilitas dari program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja OPD akan dilengkapi dengan Pra-RKA dengan mengimplementasikan Analisa Standar Belanja (ASB) Kabupaten Nunukan yang telah ditetapkan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

- Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
 - 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 18) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 - 19) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24) Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
- 25) Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.56/MENLHK.SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 26) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- 27) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.I/II/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 28) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 29) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah;
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2005 – 2025;
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan;
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025;
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun

- 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;
 - 36) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan;
 - 37) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pengelolaan Sampah;
 - 38) Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Nunukan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - 39) Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
 - 40) Peraturan Bupati Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan/pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat memberikan arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, arah kebijakan umum, program pembangunan, sasaran-sasaran strategis dan rencana kerja yang ingin dicapai DLH Kabupaten Nunukan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan 1 tahun anggaran.
2. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat dicapai sesuai target dan berorientasi pada hasil

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- ### **1.1 LATAR BELAKANG,** Mengemukakan gambaran umum tentang Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 2026;

- 1.2 LANDASAN HUKUM**, Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DLH serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DLH;
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026;
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026 serta susunan garis besar isi dokumen;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH**, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DLH tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja DLH sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DLH berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja DLH tahun-tahun sebelumnya;
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH**, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DLH, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH**, memuat uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan DLH dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DLH, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DLH, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan;
- 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025**, memuat telaahan terhadap rancangan akhir RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra DLH dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DLH;
- 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**, memuat kajian atas program dan kegiatan yang

diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi DLH

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, memuat telaahan

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DLH;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLH, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja DLH didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DLH;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH

Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 dilakukan dengan cara :

- 1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahunbersangkutan dengan tahun lalu;
- 3. Membandingkan realisasi kinerja, anggaran dan efesiensi yang telah dilakukan sampai dengan tahun bersangkutan;

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renstra PD tahun lalu (n-2 (2025)) mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang dan UPTD sesuai dengan Renstra PD yang telah dilaksanakan. Realisasi Kinerja tersebut, didapatkan berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Perubahan Renstra PD tahun 2024. Hasil realisasi capaian Renja dan Renstra PD disajikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2024		2025
			TARGET	REALISASI	TARGET
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH	80.34	80,61	80,60
		Indeks Kualitass Air (IKA)	55,12	56,67	55,22
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,43	95,52	92,54
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	93,48	94,15	94,05
2.	Meningkatnya Tutupan Lahan	Tutupan Lahan	0.76	0.81	0,76
4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	3,5	5,83	3,5

Tahun 2024 ada 4 (empat) indikator yang memiliki target yang harus dicapai dan realisasinya 4 (empat) idikator yang tercapai (melebihi) target yaitu Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang realisasi capaiannya 80,61 untuk perolehannya dari perhitungan realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan nilai capaiannya 56,67, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan nilai capaiannya 95,12, Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan nilai capaian 94,05

Adapun rumus dari IKLH adalah sebagai berikut :

$IKLH\ Kab/Kota = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL).$

Tutupan Lahan dengan nilai capaiannya 0,81 dan Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan dengan nilai capainnya 5,83.

Hasil pengukuran tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh sasaran pada tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Faktor pendukungnya adalah penguatan pengawan di bidang lingkungan hidup, dukungan anggaran yang memadai, pemantauan kualitas lingkungan hidup dilakukan secara berkala.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Bidang Lingkungan Hidup. Hasil analisis kinerja pelayanan DLH disajikan dalam tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terlampir di bawah ini

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitass Lingkungan Hidup (IKLH)	80,34	80,61	100,34
		Indeks Kualitas Air (IKA)	55,12	56,67	102,81
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	92.43	95,52	103,34
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	93.48	94,15	100,72
3.	Meningkatnya Tutupan Lahan	Tutupan Lahan	0.76	0.81	106,58
4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Pelayanan Persampahan	3,5	5.83	166,19

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
1	4		6		7		8		9		10		11		12		13				14= 7+13		15= 14/6 x 100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	i	Rp	ii	Rp	iii	Rp	iv	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														0				#DIV/0 !	#DIV/0!			#DIV/0 !	#DIV/ 0!		
	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG LINGKUNGA N HIDUP																		#DIV/0 !	#DIV/0!			#DIV/0 !	#DIV/ 0!		
	PROGRAM PERENCANA AN LINGKUNGA N HIDUP	Perse ntase	100	2,332,20 4,084.14	33	612,246, 457.00	67	859,41 5,300.0 0		48,040, 730.00	33	203,131, 154.00		3,722,500 .00	34	437,7 06,62 3.00	67	692, 601, 007. 00	100.00 %	80.59%	100		100.00 %	0.00 %		
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/K ot	Perse ntase	15	333,398, 387.90	23	43,428,0 00.00	10	62,091, 400.00		0		0		0	25.12	52,14 7,314. 00	25.12	52,1 47,3 14.0 0	251.20 %	83.98%	25.1	95,575, 314.00	167.47 %	28.67 %	tingginy a angka realisas i dan capaian target kinerja dsebabl an oleh rendah nya	Perlu penyes uaian besara n target pada RPJM D berikut nya

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
																								target RPJMD dan RKPD		
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Ko ta	dokum en	5	279,326, 954.07	1	43,428,0 00.00	1	62,091, 400.00	0	0	0	0	0	0	1	52,14 7,314. 00	1	52,1 47,3 14.0 0	100.00 %	83.98%	2	95,575, 314.00	40.00 %	34.22 %		
	Penyelengga raan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/K ota	dokum en	9	1,998,80 5,696.24	1	600,838, 162.00	1	797,32 3,900.0 0	0	48,040, 730.00	0	203,131, 154.00	0	3,722,500 .00	1	385,5 59,30 9.00	1	640, 453, 693. 00	100.00 %	80.33%	2	1,241,2 91,855. 00	22.22 %	62.10 %		
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM D	dokum en	3	926,453, 688.40	1	600,838, 162.00	1	797,32 3,900.0 0	0	48,040, 730.00	0	203,131, 154.00	0	3,722,500 .00	1	385,5 59,30 9.00	1	640, 453, 693. 00	100.00 %	80.33%	2	1,241,2 91,855. 00	66.67 %	133.9 8%		
	PROGRAM PENGENDAL IAN PENCEMAR AN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGA N HIDUP	Perse n	69	359,362, 111.30	67	712,894, 750.00	68	634,32 4,598.8 7	68		68		68		68		68	-	100.00 %	0.00%	68		98.55 %	0.00 %		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	kawas an	5	2,832,99 3,479.49	5	1,231,85 5,387.00	5	728,25 3,825.0 0	5	45,279, 921.00	5	120,432, 749.00	5	124,551,8 19.00	5	365,5 23,90 3.00	5	655, 788, 392. 00	100.00 %	90.05%	5	1,887,6 43,779. 00	100.00 %	66.63 %		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	Hidup Kabupaten/K ota																									
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokum en	5	1,240,00 0,000.00	1	248,641, 870.00	1	236,85 4,090.0 0	0	36,468, 281.00	0	53,309,8 49.00	0	24,901,71 9.00	1	94,66 4,133. 00	1	209, 343, 982. 00	100.00 %	88.39%	2	457,98 5,852.0 0	40.00 %	36.93 %		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	dokum en	5	1,481,47 3,655.83	1	736,763, 340.00	1	188,68 0,520.0 0	0	5,512,1 00.00	0	0	0	92,120,10 0.00	1	57,07 6,142. 00	1	154, 708, 342. 00	100.00 %	81.99%	2	891,47 1,682.0 0	40.00 %	60.17 %		
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kot a	dokum en	5	111,519, 823.66	1	246,450, 177.00	1	302,71 9,215.0 0	2	3,299,5 40.00	0	67,122,9 00.00	0	7,530,000 .00	0	213,7 83,62 8.00	2	291, 736, 068. 00	200.00 %	96.37%	3	538,18 6,245.0 0	60.00 %	482.5 9%		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	Penanggulan gan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/K ota	areal	75	134,362, 111.30	0	0	70	214,97 5,250.0 0	0		0		0		70	177,9 25,90 0.00	70	177, 925, 900. 00	100.00 %	82.77%	70	177,92 5,900.0 0	93.33 %	132.4 2%		
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	lapora n	4	66,226,0 00.00	0	0	1	18,730, 500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00 %	pejabat functio nal penyulu h lingkun gan belum ada	penga naan pejabat functio nal penyulu h	
	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	lokasi	2	38,134,1 11.30	0	0	1	Rp 18,306, 250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%	0.00 %	kegiata n tidak berjala n karena bersifat situasio nal, untuk tahun ini tidak ada kejadia n pencem aran yang perlu diisolasi	tetap diangg arkan di tahun 2025	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	titik	3	130,000, 000.00	0	0	1	177,93 8,500.0 0	0	0	0	0	0	5	177,9 25,90 0.00	5	177, 925, 900. 00	500.00 %	99.99%	5	177,92 5,900.0 0	166.67 %	136.8 7%	Pemuli han lahan kritis eks karhutl a	Pemba gian bibit pohon dan pupuk di 5 Kelura han/de sa	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/K ota	areal	50	125,000, 000.00	0	0	45	44,752, 000.00	-	-	-	-	45	13,19 9,000. 00	45	13,1 99,0 00.0 0	100.00 %	29.49%	45	13,199, 000.00	90.00 %	10.56 %				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	dokum en	2	85,000,0 00.00	0	0	1	44,752, 000.00	0	0	0	0	0	1	13,19 9,000. 00	1	13,1 99,0 00.0 0	100.00 %	29.49%	1	13,199, 000.00	50.00 %	15.53 %			
	PROGRAM PENGELOLA AN KEANEKARA GAMAN HAYATI (KEHATI)	Perse n	100	33,838,1 13,713.6 9	100	5,708,90 9,961.00	100	6,732,1 34,820. 00	100	1,550,1 00,250. 00	100	1,503,49 7,065.00	100	864,793,7 99.00	2,309, 124,2 19.00	100	6,22 7,51 5,33 3.00	100.00 %	92.50%	100	11,936, 425,29 4.00	100.00 %	35.28 %			
	Pengelolaan Keanekaraga man Hayati Kabupaten/K ota	kawas an	2	33,838,1 13,713.6 9	2	5,708,90 9,961.00	1	6,732,1 34,820. 00	1	1,550,1 00,250. 00	1	1,503,49 7,065.00	1	864,793,7 99.00	2,309, 124,2 19.00	1	6,22 7,51 5,33 3.00	100.00 %	92.50%	1	11,936, 425,29 4.00	50.00 %	35.28 %			

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	110	24,280,445,736.84	100	4,202,683,131.00	105	4,819,439,270.00	105	1,102,844,290.00	105	1,077,717,305.00	106	610,776,400.00	105.66	1,582,979,674.00	105.7	4,374,317,669.00	100.63%	90.76%	106	8,577,000,800.00	96.05%	35.32%	Penam bahan pengel olaan Taman Median Sebatik (2,54 Ha) dan Taman Median Mamol o (4,7 Ha)	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	unit	29	8,899,132,134.30	27	1,506,226,830.00	28	1,696,733,400.00	28	424,097,360.00	0	423,894,760.00	28	236,114,880.00	28	548,801,120.00	28	1,632,908,120.00	100.00%	96.24%	28	3,139,134,950.00	96.55%	35.27%		
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	unit	3	558,535,822.55	0	0	3	215,962,150.00	3	23,158,600.00	0	1,885,000.00	3	17,902,519.00	3	177,343,425.00	3	220,289,544.00	100.00%	102.00%	3	220,289,544.00	100.00%	39.44%		
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA	Perse ntase	33	1,038,011,165.44	33	22,684,000.00	24	66,370,000.00	0	0	0	0	33	37,888,792.00	33	1,038,011,165.44	33	1,038,011,165.44	137.50%	1563.98%	66		200.00%	0.00%		

	DAN																								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi	Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)	Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n				
	BERACUN (LIMBAH B3)																								

	Pengumpul an Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Ton	375	1,038,01 1,165.44	84.8	22,684,0 00.00	75	66,370, 000.00	0	0	0	0	0	11,791,00 0.00	64.04	26,09 7,792. 00	64.04	37,8 88,7 92.0 0	85.39 %	57.09%	149	60,572, 792.00	39.68 %	5.84 %	semaki n rendah nilai realisas i semaki n positif, karena peningk atan jumlah LB3 terkum pul atau yang dihasilk an adalah trend negatif	
--	--	-----	-----	----------------------	------	-------------------	----	-------------------	---	---	---	---	---	-------------------	-------	-----------------------	-------	---------------------------	------------	--------	-----	-------------------	------------	-----------	---	--

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	dokumen	5	1,038,01 1,165.44	1	22,684,0 00.00	1	66,370, 000.00	0	0	0	0	0	11,791,00 0.00	1	26,09 7,792. 00	1	37,8 88,7 92.0 0	100.00 %	57.09%	2	60,572, 792.00	40.00 %	5.84 %		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Perse ntase	### #	889,573, 492.76	36.4	269,281, 980.00	15.4	375,58 0,900.0 0	33	59,482, 800.00	5	8,416,80 0.00	45	50,121,30 0.00	9	44,49 7,093. 00	92	162, 517, 993. 00	598.18 %	43.27%	128	431,79 9,973.0 0	1026.8 8%	48.54 %	angka yang ditunjukkan pada capaian kinerja adalah trend negatif, semakin rendah angka semakin baik,	perlu penyediaan rumus perhitungan capaian kinerja

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	133	889,573,492.76	56	90,247,245.00	50	375,580,900.00	33	59,482,800.00	5	8,416,800.00	45	50,121,300.00	9	44,497,093.00	92	162,517,993.00	184.00%	43.27%	148	252,765,238.00	111.28%	28.41%	tingginya capaian realisasi disebabkan oleh rendahnya target kinerja RPJMD /Renstra	Perlu penyesuaian target kinerja pada RPJMD/Renstra berikutnya
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	dokumen	12	220,000,000.00	45	15,983,979.00	35	69,749,500.00	26	8,416,800.00	1	8,416,800.00	44	12,560,800.00	2	12,482,093.00	73	41,876,493.00	208.57%	60.04%	118	57,860,472.00	983.33%	26.30%	tingginya capaian realisasi disebabkan oleh rendahnya target kinerja RPJMD /Renstra	Perlu penyesuaian target kinerja pada RPJMD/Renstra berikutnya

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Badan usaha	17	459,573,492.76	11	92,071,172.00	15	198,746,200.00	7	51,066,000.00	4	0	1	37,560,500.00	3	32,015,000.00	15	120,641,500.00	100.00 %	60.70%	26	212,712,672.00	152.94 %	46.28 %	Tingginya capaian kinerja disebabkan oleh dukungan penambahan anggaran, dan rendahnya realisasi anggaran adalah karena upaya efisiensi penggunaan anggaran pengawasan	diperlukan penganngaran yang proporsional
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	orang	4	110,000,000.00	0	0	4	107,085,200.00	0	0	0	0	0	4	106,763,987.00	4	106,763,987.00	100.00 %	99.70%	4	106,763,987.00	100.00 %	97.06 %			

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	PROGRAM PENGAKUA N KEBERADAA N MASYARAK AT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Perse n	20	259,502, 798.71	20	49,969,1 00.00										-			#DIV/0! !	#DIV/0!			0.00% 0.00%			
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Perse n	50	154,790, 166.05	50	154,790, 166.05	50	51,259, 900.00	0	0	0	0	0	50	27,41 1,890. 00	50	27,4 11,8 90.0 0	100.00 %	53.48%	50	182,20 2,056.0 5	100.00 %	117.7 1%			

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	dokum en	5	154,790, 166.05	3	1,485,00 0.00	2	51,259, 900.00	0	0	0	0	0	0	5	27,41 1,890. 00	5	27,4 11,8 90.0 0	250.00 %	53.48%	5	28,896, 890.00	100.00 %	18.67 %		
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Perse n	100	104,712, 632.66	0	0	20	50,243, 000.00	0	942,00 0.00	0	0			20	26,37 5,500. 00	20	27,3 17,5 00.0 0	100.00 %	54.37%	20	27,317, 500.00	20.00 %	26.09 %		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	Pemberdayaa n, Kemitraan, Pendampinga n, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	dokum en	4	104,712, 632.66	0	0	2	50,243, 000.00	0	942,00 0.00	0	0	0	0	15	26,37 5,500. 00	15	27,3 17,5 00.0 0	750.00 %	54.37%	15	27,317, 500.00	375.00 %	26.09 %	tingginy a pengus ulan Hutan Adat oleh Masyar akat Hukum adat	penda mpinga n pengus ulan Hutan Adat ke KLHK
	PROGRAM PENINGKAT AN PENDIDIKAN , PELATIHAN DAN PENYULUHA N LINGKUNGA N HIDUP UNTUK MASYARAK AT	Perse n	100	259,502, 791.36	100	31,677,1 00.00											-	#DIV/0 !	#DIV/0!			0.00%	0.00 %			
	Penyelengga raan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Daerah	Perse n	100	259,502, 791.36	100	31,665,3 00.00	100	72,655, 910.00											0.00%	0.00%			0.00%	0.00 %		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	Kabupaten/Kota																									
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	dokumen	19	106,000,000.00	4	27,293,000.00	4	24,470,000.00	0	0	0	0	0	0	5	10,418,000.00	5	10,418,000.00	125.00%	42.57%	9	37,711,000.00	47.37%	35.58%	Program Kampung Iklim untuk desa dan kelurahan	Pendampingan pengusulan desa Proklim
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	orang	30	103,790,166.05	20	4,372,300.00	25	24,128,370.00	0	0	0	0	0	0	40	18,156,806.00	40	18,156,806.00	160.00%	75.25%	60	22,529,106.00	200.00%	21.71%		
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok	lembaga	2	49,712,625.31	0	0	15	24,057,540.00	0	3,844,000.00	0	40,000.00	0	0	18	19,686,340.00	18	23,570,340.00	120.00%	97.97%	18	23,570,340.00	900.00%	47.41%		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	mpok masyarakat																									
	PROGRAM PENGHARG AAN LINGKUNGA N HIDUP UNTUK MASYARAK AT	Perse n	100	259,500, 320.13	33	259,500, 320.13										-	#DIV/0 !	#DIV/0!	33	259500 320.1	33.00 %	100.0 0%				
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Perse n	42	259,500, 320.13	3	49,979,5 00.00	3	52,600, 190.00									0.00%	0.00%	3	499795 00	7.14%	19.26 %				
	Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/D unia Usaha/Dunia Pendidikan/Fil antropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	entitas	26	259,500, 320.13	4	49,979,5 00.00	5	52,600, 190.00	0	0	0	0	0	0	17,65 6,204. 00	0	17,6 56,2 04.0 0	0.00%	33.57%	4	67,635, 704.00	15.38 %	26.06 %	rendah nya partisip asi sekolah meengi kuti penilaian adiwiya ta	penilai an adiwiya ta diubah melaku kan penda mpinga n kepada 15 sekolah	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
																										agar bisa mengik uti penilai an adiwiya ta 20205
	PROGRAM PENANGAN AN PENGADUA N LINGKUNGA N HIDUP	Perse ntase	100	356,690, 477.94	100	48,861,4 50.00	100	54,949, 550.00	100	13,550, 000.00	0	-	100	19,400,00 0.00	100	6,323, 500.0 0	100	39,2 73,5 00.0 0	100.00 %	71.47%	100	88,134, 950.00	100.00 %	24.71 %		
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/K ota	Perse ntase	100	356,690, 477.94	100	48,861,4 50.00	100	54,949, 550.00	100	13,550, 000.00	0	0	100	19,400,00 0.00	100	6,323, 500.0 0	100	39,2 73,5 00.0 0	100.00 %	71.47%	100	88,134, 950.00	100.00 %	24.71 %		
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Ko ta	penga duan	9	247,000, 000.00	2	48,861,4 50.00	2	54,949, 550.00	1	13,550, 000.00	0	0	2	19,400,00 0.00	0	6,323, 500.0 0	3	39,2 73,5 00.0 0	150.00 %	71.47%	5	88,134, 950.00	55.56 %	35.68 %	Tingg in ya realisas i dan capaian kinerja disebab kan oleh jumlah pengad	semua pengad uan yang masuk ditinda klanjuti dengan melaku kan efisien

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
																								uan yang masuk melebi h target	si anggar an	
	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kot a	perkar a	5	109,690, 477.94	0	0	1	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	0.00%	#DIV/0!	0	-	0.00%	0.00 %	Sub kegiata n tdk diangg arkan	jika terjadi sengke ta, tetap ditanga ni melalui sub kegiata n pengel oan pengad uan	
	PROGRAM PENGELOLA AN PERSAMPAH AN	persen tase	82	8,070,55 1,807.59	77	7,564,88 2,658.00	79	7,776,6 04,440. 01	29	1,416,5 99,470. 00	40	1,803,48 6,330.00	26.1	1,374,630 ,872.00	38.38	5,897, 792,8 30.00	133.5	10,4 92,5 09,5 02.0 0	169.01 %	134.92%	211	18,057, 392,16 0.00	256.73 %	223.7 4%		
	Pengelolaan Sampah	persen tase	31	37,872,4 27,269	26	8,023,30 8,660	28	11,111, 820,34 5	19	1,416,5 99,470. 00	22.1	1,803,48 6,330.00	### #	1,374,630 ,872.00	35	5,897, 792,8 30.00	100	10,4 92,5 09,5 02.0 0	357.14 %	94.43%	126	18,515, 818,16 2.00	406.45 %	48.89 %	tingginy a capaian realisas i disebab kan oleh rendah nya	Perlu penyes uaian target kinerja pada RPJM D/Rens tra
			51		51		51		40		58		27.8		41.75		167	02.0 0	327.47 %		218		427.47 %			

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
																									target kinerja RPJMD /Renstr a	berikut nya
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	kelompok	4	39,621,761.23	3	5,902,100.00	7	102,872,515.00	6	2,252,250.00	6	0	0	0	0	37,197,850.00	12	39,450,100.00	171.43 %	38.35%	4	45,352,200.00	100.00 %	114.46%		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	unit	5	43,882,424.06	1	7,825,500.00	68	2,763,006,300.00	1	1,887,000.00	1	0	58	0	8	2,643,067,900.00	68	2,644,950.00	100.00 %	95.73%	69	2,652,780,400.00	1380.00 %	6045.20%		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan , biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	ton	698 1	36,812,1 59,215.3 3	648 3	6,772,28 4,305.00	667 7	7,281,2 66,968. 00	## #	1,398,0 53,170. 00	387 0	1,770,12 3,330.00	185 5	1,356,561 ,000.00	2787. 7	2,464, 577,5 00.00	1115 1	6,98 9,31 5,00 0.00	167.00 %	95.99%	### #	13,761, 599,30 5.00	252.60 %	37.38 %		
	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	ton	20	778,525, 567.86	15	749,415, 372.00	16	920,13 1,207.0 0	3	11,735, 000.00	3.53	21,363,0 00.00	3.89	8,518,522 .00	5.60	749,9 95,38 0.00	16	791, 611, 902. 00	100.00 %	86.03%	31	1,541,0 27,274. 00	155.00 %	197.9 4%		
	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	dokum en	2	198,238, 300.92	2	29,455,3 81.00	2	44,543, 355.00	0	2,672,0 50.00	1	12,000,0 00.00	0	9,551,350 .00	1	2,954, 200.0 0	2	27,1 77,6 00.0 0	100.00 %	61.01%	4	56,632, 981.00	200.00 %	28.57 %		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n	
	NON URUSAN																-	#DIV/0 !	#DIV/0!			#DIV/0 !	#DIV/ 0!				
	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG XX															0	-	#DIV/0 !	#DIV/0!	0	-	#DIV/0 !	#DIV/ 0!				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	perse n	80	35,096,0 27,068.9 9	80	6,682,27 2,875.00	80	7,018,5 68,686. 80	80	1,776,3 74,118. 22	80	2,188,17 5,143.78	80	1,353,871 ,918.00	80	3,076, 865,0 83.00	80	8,39 5,28 6,26 3.00	100.00 %	119.62%	80	15,077, 559,13 8.00	100.00 %	42.96 %			
	Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokum en	7	230,867, 700.00	7	63,164,3 30.00	7	48,957, 310.00	3	10,480, 200.00	1	1,201,85 0.00	2	3,562,000 .00	1	30,45 7,590. 00	7	45,7 01,6 40.0 0	100.00 %	93.35%	7	108,86 5,970.0 0	100.00 %	47.16 %			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokum en	2	180,000, 000.00	2	31,316,1 95.00	2	30,001, 810.00	1	8,900,0 00.00	0	201,850. 00	1	1,440,000 .00	0	18,86 8,090. 00	2	29,4 09,9 40.0 0	100.00 %	98.03%	2	60,726, 135.00	100.00 %	33.74 %			

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	5	50,867,700.00	5	31,848,135.00	5	18,955,500.00	2	1,580,200.00	1	1,000,000.00	1	2,122,000.00	1	11,589,500.00	5	16,291,700.00	100.00 %	85.95%	5	48,139,835.00	100.00 %	94.64 %		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	unit	3	21,769,298,075.00	3	4,337,323,669.00	3	5,347,476,071.00	3	1,182,229,301.22	3	1,723,443,406.78	3	898,165,395.00	3	1,425,356,086.00	3	5,229,194,189.00	100.00 %	97.79%	3	9,566,517,858.00	100.00 %	43.94 %		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	37	21,769,298,075.00	39	4,337,323,669.00	37	5,347,476,071.00	37	1,182,229,301.22	37	1,723,443,406.78	37	898,165,395.00	37	1,425,356,086.00	37	5,229,194,189.00	100.00 %	97.79%	37	9,566,517,858.00	100.00 %	43.94 %		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	unit	3	1,350,910,000.00	3	405,704,285.00	3	379,136,975.00	3	49,727,183.00	3	63,341,325.00	3	25,209,873.00	3	236,206,179.00	3	374,484,560.00	100.00 %	98.77%	3	780,188,845.00	100.00 %	57.75 %		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	4	250,000,000.00	4	79,848,030.00	4	120,675,770.00	2	0	2	7,588,830.00	0	0	0	110,557,000.00	4	118,145,830.00	100.00 %	97.90%	4	197,993,860.00	100.00 %	79.20 %		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	3	193,858,500.00	3	38,763,540.00	3	32,895,190.00	1	12,727,183.00	1	3,608,495.00	1	2,970,000.00	0	12,226,866.00	3	31,532,544.00	100.00 %	95.86%	3	70,296,084.00	100.00 %	36.26 %		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	2	52,948,5 00.00	2	10,589,3 15.00	2	10,589, 315.00	2	0	0	0	0	0	0	Rp 10,38 7,380. 00	2	10,3 87,3 80.0 0	100.00 %	98.09%	2	20,976, 695.00	100.00 %	39.62 %		
	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lapora n	7	835,103, 000.00	7	276,503, 400.00	7	209,98 8,400.0 0	7	37,000, 000.00	8	52,144,0 00.00	0	22,239,87 3.00	0	Rp 98,06 2,433. 00	7	209, 446, 306. 00	100.00 %	99.74%	7	485,94 9,706.0 0	100.00 %	58.19 %		
	Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	dokum en	2	19,000,0 00.00	0	0	1	4,988,3 00.00	0	0	0	0	0	0	1	Rp 4,972, 500.0 0	1	4,97 2,50 0.00	100.00 %	99.68%	1	4,972,5 00.00	50.00 %	26.17 %		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	1	125,000, 000.00	1	43,591,9 00.00	1	20,000, 000.00	0	0	0	0	1	0	0	19,98 0,000. 00	1	19,9 80,0 00.0 0	100.00 %	99.90%	2	63,571, 900.00	200.00 %	50.86 %		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	1	125,000, 000.00	1	43,591,9 00.00	1	20,000, 000.00	0	0	0	0	1	0	0	19,98 0,000. 00	1	19,9 80,0 00.0 0	100.00 %	99.90%	2	63,571, 900.00	200.00 %	50.86 %		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	unit	3	4,223,09 0,900.00	3	818,090, 012.00	3	821,48 3,080.0 0	3	185,39 0,684.0 0	3	124,370, 852.00	3	113,671,2 50.00	3	171,6 67,10 8.00	3	595, 099, 894. 00	100.00 %	72.44%	3	1,413,1 89,906. 00	100.00 %	33.46 %		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	lapora n	3	692,540, 000.00	3	105,983, 500.00	3	158,50 0,000.0 0	3	33,212, 684.00	3	13,504,8 52.00	3	405,250.0 0	3	52,10 2,068. 00	3	99,2 24,8 54.0 0	100.00 %	62.60%	3	205,20 8,354.0 0	100.00 %	29.63 %		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	lapora n	30	3,530,55 0,900.00	30	712,106, 512.00	30	662,98 3,080.0 0	30	152,17 8,000.0 0	30	110,866, 000.00	30	113,266,0 00.00	30	Rp 119,5 65,04 0.00	30	495, 875, 040. 00	100.00 %	74.79%	30	1,207,9 81,552. 00	100.00 %	34.22 %		
	Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	unit	3	7,396,86 0,393.99	3	1,685,53 5,740.00	3	1,655,7 29,800. 00	3	348,54 6,750.0 0	3	275,817, 710.00	3	313,263,4 00.00	3	1,193, 198,1 20.00	3	2,13 0,82 5,98 0.00	100.00 %	128.69%	3	3,816,3 61,720. 00	100.00 %	51.59 %		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	3	920,000, 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0 !	#DIV/0!	0	-	0.00%	0.00 %	tidak diangg arkan		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	unit	3	6,396,86 0,393.99	3	1,685,53 5,740.00	3	1,640,7 29,800. 00	3	348,54 6,750.0 0	3	275,817, 710.00	3	313,263,4 00.00	3	1,178, 199,0 90.00	3	2,11 5,82 6,95 0.00	100.00 %	128.96%	3	3,801,3 62,690. 00	100.00 %	59.43 %		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pememntaha n Daerah Dan Program / Kegiatan	Satua n	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun (Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan Tahun (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/K ota yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kot a s/d Tahun... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kot a s/d Tahun ... (%)		Permas alahan	Upaya Menga tasi Perma salaha n
	atau Lapangan																									
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	3	80,000,0 00.00	0	0	3	15,000, 000.00	0	0	0	0	3	0	0	14,99 9,030. 00	3	14,9 99,0 30.0 0	100.00 %	99.99%	3	14,999, 030.00	100.00 %	18.75 %		

Nunukan, 06 Januari 2025

Kepala Dinas,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
NIP. 19661008 199903 1 007

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH

Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Dinas Lingkungan Hidup berusaha mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih yang kemudian menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021 - 2026

Isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Dari hasil analisis terhadap isu-isu internal dan eksternal dalam pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan, Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH adalah sebagai berikut;

- a. Kebersihan Kota
 - Belum optimalnya Kebersihan TPS setelah jam buang sampah
 - Belum berhasilnya pemilahan dan pengelolaan sampah
 - Adanya Timbulan Sampah di Pesisir dan Laut
 - Belum terkelolanya sampah B3 Rumah Tangga
- b. Keindahan Kota
 - Penataan Kota melalui Program Citra Kota
 - Penataan taman kota
 - Penataan tanaman di median jalan
 - Perapian pohon pinggir jalan
- c. Belum optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan belum efektifnya Penataan Hukum Lingkungan
- d. Ketidaktaatan Pemanfaatan Ruang
- e. Penataan/Pembukaan Lahan
- f. Kejadian Banjir di DAS Ampal
- g. Penurunan Kualitas Air Sungai

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Dengan membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024, maka hasil review terhadap rancangan akhir RKPD DLH Tahun 2024 dapat dijelaskan dalam tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD DLH Tahun 2025

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9,002,697,851	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 778,946,156	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 2,163,204,499	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 10,294,596,357.94	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah	Rp 9,598,000	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 353,604,100	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp 53,119,990	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 104,087,070	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 37,759,000	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 24,605,230	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
11	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 8,011,820,238	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
Jumlah		Rp 30,834,038,491.94	

Sumber data : DLH Kab. Nunukan Tahun 2025

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dari hasil Musrembang di semua Kecamatan di Kabupaten Nunukan tahun 2024 ada usulan yang masuk untuk urusan lingkungan hidup. Dan dari hasil forum OPD yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 usulan yang masuk sudah terakomodir di rencana program dan kegiatan yang ada di Tahun 2024

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Dengan mengacu pada Misi Presiden tahun 2020-2024 dan juga dua pilar dari KLHK di atas, maka dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan KLHK, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim
2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas telah diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDG's). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitannya dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK diatas, maka rumusan sasaran strategis KLHK adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih 2019 - 2024 mempunyai peran penting. Peran penting Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung komitmen nasional untuk menurunkan emisi GRK sebanyak 26% dari Business as Usual (BAU) pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional dan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengurangi emisi

GRK sebanyak 30% pada tahun 2030 dari tingkat emisi pada tahun tersebut, merupakan tujuan paling strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.

Kedepan, menetapkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2024, yakni: Menurunnya emisi gas rumah kaca dari BAU Baseline, dengan sasaran jangka menengahnya yaitu Menurunnya emisi gas rumah kaca, dengan indikator sasaran Penurunan Emisi (ton Co2 eq Juta).

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Nunukan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu dilaksanakan kebijakan dan strategi daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah dengan target pengurangan sampah sebesar 30% dan target penanganan sampah sebesar 70% hingga tahun 2025.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan membantu Bupati Nunukan dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Nunukan. Pernyataan visi Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Nunukan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 adalah

“Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera”

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat aman tertib dan tentram.

Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan ada pada Visi Nyaman Dihuni dengan isu strategis Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sedangkan pada misi yang terkait adalah misi kelima, yaitu : Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran DLH Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri atas: - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Lahan (IKL)
		Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Status Kualitas LH
		Meningkatnya Tutupan Lahan	Tutupan Lahan
		Pelayanan Pengelolaan Sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan

Sumber: Renstra DLH Kab. Nunukan 2021-2026

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan DLH tahun 2025 adalah sekumpulan rencana kerja suatu DLH, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah. Adapun rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2025 dapat dilihat dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator		Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya pelayanan admisitrasi perkantoran yang berkualitas		80%	9,002,697,851.00	Dana Bagi Hasil (DBH)		80%	7,159,021,107.64
	1.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualita		7 dok	161,359,360.00			7 dok	52,000,000.00
	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dok	138,906,490.00			2 dok	40,000,000.00
	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 lap	22,452,870.00			5 lap	12,000,000.00
	1.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan		3 unit	5,811,379,436.00			3 unit	4,354,859,615.00
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37 orang/ bulan	5,811,379,436.00			37 orang/ bulan	4,354,859,615.00
	1.3	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah Umum		5 unit	392,473,775.00			5 unit	284,062,400.00
	1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan		4 paket	204,195,300.00			4 paket	50,000,000.00

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator		Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 paket	36,311,820.00			3 paket	38,771,700.00
	1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	3,999,655.00			2 paket	10,589,700.00
	1.3.4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 dok	-			1 dok	7,000,000.00
	1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi		7 lap	147,967,000.00			7 lap	177.701.000
	1.4	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan		1 unit	74,350,000.00			1 unit	25,000,000.00
	1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 unit	74,350,000.00			1 unit	25,000,000.00
	1.5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Jasa Penunjang		3 unit	1,067,211,240.00			3 unit	844,618,180.00
	1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 lap	132,173,000.00			3 lap	138,508,000.00
	1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		30 lap	935,038,240.00			30 lap	706,110,180.00
	1.6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan barang milik daerah		3 unit	1,495,924,040.00			3 unit	1,598,480,912.64

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator		Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Ops. atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 unit	1,468,123,800.00			3 unit	1,348,480,912.64
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3 unit	-				
	1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	27,800,240.00			3 unit	25,000,000.00
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup		Persentase dokumen perencanaan yang di susun dan dilaksanakan		67%	778,946,156.00			100%	437,438,448.53
	1.1.1	Kegiatan: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	Jumlah kesesuaian muatan RPPLH yang dilaksanakan		15%	778,946,156.00			15%	179,326,954.07
	1.1.1.2.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota		1 dok	778,946,156.00			-	179,326,954.07
	1.1.1.3.	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang ditetapkan		1 dok	-			-	-

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator		Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.1.2	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah rencana dokumen KLHS yang di susun		2 dok	-			1 dok	258,111,494.46
	1.1.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		1 dok	-			1 dok	258,111,494.46
	1.1.2.3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan		1 dok	-			1 dok	-
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase pemenuhan terhadap baku mutu lingkungan (air dan udara)		68%	2,163,204,499.00			69%	719,018,521.37
	1.2.1	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan hasil pemantauan kualitas LH		5 Kawasan	2,082,255,549.00			5 Kawasan	584,018,521.37

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator		Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut		1 dok	345,641,869.00	dbh		1 dok	250,000,000.00
	1.2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 dok	1,429,999,680.00	DBH-DR		1 dok	309,382,984.57
	1.2.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		1 dok	306,614,000.00	dbh		1 dok	24,635,536.80
	1.2.2	Kegiatan : Penganggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah areal yang mengalami pencemaran/kerusakan yang ditanggulangi		60 areal	40,922,700.00	dbh		70 areal	50,000,000.00

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator		Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.2.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		1 laporan-	21,310,200.00	dbh		1 lap	-
	1.2.2.2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi		1 lokasi-	19,612,500.00	dbh		1 lokasi	-
	1.2.2.3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		1 titik	-	dbh		1 titik	50,000,000.00
	1.2.3	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah areal yang dilakukan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan LH		50 areal	40,026,250.00			50 areal	85,000,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan		1 dokumen	40,026,250.00	dbh		2 dok	85,000,000.00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		0	-			1 dok	40,000,000.00
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3)		Cakupan pengendalian B-3 dan Limbah B-3		24%	9,598,000.00			24	219,160,664.20
	1.3.1	Kegiatan : Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah limbah B-3 yang terkumpul		75 ton	9,598,000.00			75 ton	219,160,664.20

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator		Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		1 dok	9,598,000.00			1 dok	219,160,664.20
5	Program Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah		13,33%	353,604,100.00			12,50%	187,820,250.90
	1.4.1	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi perizinan		27 kegiatan	353,604,100.00			29 kegiatan	187,820,250.90
	1.4.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		12 dok	45,132,000.00			12 dok	50,000,000.00
	1.4.1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		15 badan usaha	301,472,100.00			17 badan usaha	87,820,250.90
	1.4.1.3	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		2 orang	7,000,000.00			0	-

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator		Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.4.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		2 dok	-			2 dok	50,000,000.00
6	Program Penanganan Pengaduan LH		Persentase penanganan pengaduan		100%	24,605,230.00			100%	50,000,000.00
	1.5.1	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan		100%	24,605,230.00			100%	50,000,000.00
	1.5.1.1	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti /Ditangani		2 dok	24,605,230.00			1 dok	25,000,000.00
	1.5.1.	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		1 dok	-			1 dok	25,000,000.00
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Persentase Wilayah Keanekaragaman Hayati dalam Kabupaten		100%	10,294,596,357.94	DBH dan DBH-DR		100%	7,082,596,068.84
	2.1.1	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Keanekaragaman Hayati yang di Kelola		2 kawasan	10,294,596,357.94	DBH dan DBH-DR		2 kawasan	7,082,596,068.84
	2.1.1.1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Ha	205,000,000.00	DBH		3 Ha	150,000,000.00
	2.1.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		100 Ha	8,149,073,621.94	DBH dan DBH-DR		105 Ha	4,957,596,068.84

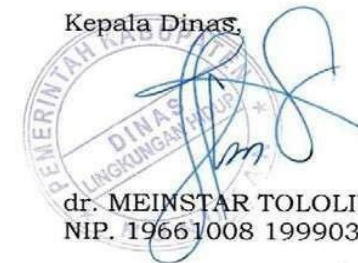
No	Urusan/Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator		Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2.1.1.3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						20 orang	50,000,000.00
	2.1.1.4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		27 unit	1,940,522,736.00	DBH		29 unit	1,925,000,000.00
8	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		Persentase penetapan Hak MHA terkait PPLH		20%	53,119,990.00			20%	54,790,166.05
	2.2.1	Kegiatan : Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	jumlah pengakuan Hak MHA terkait PPLH		50%	-			59%	54,790,166.05
	2.2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		0	-			1 dok	54,790,166.05
	2.2.2	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase pendampingan kelompok MHA		20%	53,119,990.00			0%	- -
	2.2.2.1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		2 dok	53,119,990.00			0	- -

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator		Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk MasyarakatProgram		Persentase SDM yang mengikuti pengembangan pelatihan/penyuluhan		100%	104,087,070.00			100%	54,790,166.05
	2.3.1	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan peduli lingkungan dan penyuluhan LH		100%	104,087,070.00			100%	54,790,166.05
	2.3.1.1	Peningkatan Kompetensi dan Kompe tensi Sumber Daya Manusia Bidang LH untuk Lembaga Pendidikan formal/lem baga masy./komunitas klp. masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		1 lembaga	25,150,800.00 -			0	-
	2.3.1.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		5 pendampingan	28,952,000.00			6 pendampinga	28,000,000.00
	2.3.1.3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		25 orang	49,984,270.00			30 orang	26,790,166.05
10	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase penghargaan yang diterima oleh masyarakat		67%	37,759,000.00			100%	54,790,320.68
	2.4.1	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang menerima penghargaan		40%	37,759,000.00			50%	54,790,320.68
	2.4.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Entitas		6 entitas	37,759,000.00			7 entitas	54,790,320.68
12	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Sampah Terkelola		81%	8,011,820,238.00			82%	8,070,551,807.57
	3.1.1	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan sampah		30%	8,011,820,238.00			31%	8,070,551,807.57
			Persentase Penanganan sampah		51%				51%	

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Indikator		Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3.1.1.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		2 dokumen	8,519,160.00			2 dokumen	41,854,271.13
	3.1.1.2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		18 laporan	68,528,380.00			20 laporan	164,370,961.86
	3.1.1.3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		6811 ton	7,807,427,458.00			6981. ton	7,846,696,243.84
	3.1.1.4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis		4 kelompok	8,115,360.00			4 kelompok	8,365,386.15
	3.1.1.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		1 unit	119,229,880.00			1 unit	9,264,944.59
Total Anggaran Program						30,834,038,491.94				24,089,977,521.83

Nunukan, 06 Januari 2025

Kepala Dinas,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
NIP. 19661008 199903 1 007

RENCANA KERJA DLH KABUPATEN NUNUNKAN

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran.

Dalam prosesnya, Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD, Rencana Strategis (RENSTRA), serta mempertimbangkan isu strategis lingkungan hidup yang mengemuka dan target pencapaian Jakstrada Kabupaten Nunukan tahun 2025

Renja DLH ini merupakan masukan utama untuk penetapan rencana kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Nunukan, untuk Tahun Anggaran 2025. Semoga Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup

Nunukan, 06 Januari 2025

Kepala Dinas,

dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
NIP. 19661008 199903 1 007